

Publikasi #2013
Ikatan Sosiologi Indonesia



Memahami Kembali Indonesia

Penyunting: Akhmad Ramdhon

Memahami Kembali Indonesia

**Publikasi #2013
Ikatan Sosiologi Indonesia**

Publikasi #2013
Ikatan Sosiologi Indonesia

Ikatan Sosiologi Indonesia
Lembaga Sosiologi FISIP Universitas Sebelas Maret
Buku Ketiga

Memahami Kembali Indonesia

© Penulis

Penyunting: Akhmad Ramdhon

Reviewer:

Akhmad Ramdhon,

Argyo Demartoto,

Siti Zunariyah,

Yulius Slamet

Foto Sampul: Edi Wibowo

Perancang Sampul: Aryo Prakosa

Penata Letak: Mapa

Diterbitkan atas kerjasama:

Ikatan Sosiologi Indonesia,

Lab-Sosio Sosiologi FISIP Universitas Sebelas Maret

dengan:

Buku Litera Yogyakarta

Minggiran MJ II/1378, RT 63/17

Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta

Telp. 0274-388895, 08179407446

bukulitera@gmail.com, matapadi_media@yahoo.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan Pertama, Oktober 2013

xvi+ 952 hlm.; 15.5 x 23.5 cm

ISBN: 978-602-7636-46-0

Dicetak Oleh:

Mata Padi Pressindo

Telp. 0274-388895

08179407446, 081227837806

bukulitera@gmail.com

Pengantar

Ide-ide Reformasi tak terasa telah berjalan satu dekade lebih. Banyak perubahan yang terjadi, desentralisasi, pemilihan umum yang terbuka, pemilihan presiden secara langsung, pemilihan kepala daerah, reformulasi regulasi, penataan kembali kelembagaan dalam skala nasional hingga regional. Transisi tersebut juga beriringan dengan ketegangan, konflik, dan kekerasan yang melanda nusantara. Indikator-indikator kemiskinan, kriminalitas, dan korupsi tiba-tiba menyeruak bersamaan dengan tumbuhnya indikator pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam skala yang lebih luas. Beragam tantangan hadir bersamaan dengan momentum global untuk sesegera mungkin diadaptasi.

Melihat kembali semua gejala dan jejak perubahan yang ada dan telah terjadi dalam era Reformasi menjadi penting untuk memberi bekal pengetahuan sekaligus menjelaskan posisi strategis kita dalam berbangsa dan bernegara. Upaya mengupdate semua bentuk-bentuk pengetahuan terbaru akan menjadi modal bagi semua pihak untuk mengambil langkah-langkah terbaik bagi proses dan upaya untuk berkontribusi bagi pengejawantahan Reformasi. Perubahan yang telah berjalan mesti dilihat kembali dalam sudut pandang yang kritis agar kita punya kesempatan memperbaiki dan tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan masa lalu. Untuk itu, beragam kontribusi dalam bentuk temuan ide, riset, dokumentasi maupun publikasi tentang beragam perubahan yang telah terjadi satu dekade terakhir menjadi urgent untuk mengkajinya bersama-sama.

Materi dalam buku ini adalah rangkaian dari Seminar Nasional Ikatan Sosiologi Indonesia #2013, yang bertujuan untuk mempertemukan para peneliti, pengajar, pembelajar, dan peminat Sosiologi seIndonesia lewat forum ilmiah yang berkala. Kesempatan untuk bersama dalam forum akan memberi kesempatan untuk

berdialog, berdiskusi, dan mempublikasi temuan-temuan terbaru dalam bidang Sosiologi.

Ada beragam hasil kajian yang hadir, dalam upayanya untuk memahami kembali Indonesia -selepas satu dekade perubahan yang dirilis bersama pekik Reformasi. Tuntutan tentang perubahan diserukan bersamaan dengan kesadaran publik untuk mempersoalkan kembali makna tradisi. Bagian Tradisi dan Perubahan, menghadirkan persoalan tradisi terkait dengan isu agraria baik dalam kasus Sanggang maupun dalam jebakan keistimewaan Yogyakarta, formalisasi tradisi di Kauman hingga proses institusionalisasi komunitas-komunitas khusus/nan modern di Makassar. Tradisi juga harus menghadapi kenyataan bahwa persoalan globalisasi juga telah menghadirkan fakta-fakta baru tentang kehidupan, untuk kemudian tradisi mampu merespons dalam bentuk-bentuk, seperti: tenun Toraja yang berupaya tetap bertahan, pasar tradisional di Surakarta yang direvitalisasi, hingga konstruksi identitas yang bangun oleh pesantren Al-Mukmin secara kelembagaan. Disisi lain, rasionalitas menjadi mekanisme bertahan bagi para perajin di Kota Gede dan praktek-praktek kapitalisasi oleh komunitas Pasompe dengan segala konsekuensinya.

Persoalan lingkungan menjadi fokus kajian untuk melihat kembali Indonesia, yang membenteng permasalahan lingkungan mulai dari kebijakan reformasi pengelolaan hutan, sertifikasi hutan dan partisipasi pengelolaan hutan di Gunung Kidul, hingga perlawanan pengelolaan hutan di Muna Sulawesi Tenggara. Ide-ide pemberdayaan didorong untuk pengelolaan semua sumber daya alam yang ada, tak hanya hutan tapi juga air di Batu Malang, nelayan, hingga strategi pengelolaan atas bencana pun harus mengalami pembaharuan. Pemberdayaan warga mutlak tak terhindarkan bersamaan dengan semangat untuk menjadikan seluruh sumber daya yang ada sebagai subjek dan bukan lagi sekedar obyek dari perubahan yang terjadi.

Kehadiran manusia yang menjadi subyek juga berlaku dalam kajian isu perempuan yang makin berupaya untuk berdaya lewat politik di Bali, teknologi Jateng-Yogyakarta, maupun rumah tangga berspektif gender di Soppeng-Bone hingga kelembagaan PKK.

Namun beragam tantangan tetap menghadang ketika kepekaan belum menjadi mainstream kolektif, dimana narasi perempuan pembunuhpun perlu dipahami sebagai relasi sebab-akibat, kekerasan masih terjadi di Palembang, pekerja terburuk anak dan Ayla masih menjadi potret di Surakarta, perkawinan dibawah umur di Cianjur, hingga buruh migran di Jawa Timur.

Problem diatas tumpang-tindih dengan proses pembelajaran yang juga berlaku dalam lingkup pendidikan disekitar kita. Dimana tantangan mewujudkan pendidikan inklusi, multi kultural, pendidikan dasar anak, hingga tantangan untuk meminimalisir kekerasan dalam dunia pendidikan. Strategi pendidikan pada saat bersamaan sebenarnya juga mampu menjadi modal sosial bagi warga, yang juga dikaji lewat beragam temuan seperti: modal sosial dalam relasi ekonomi batik, falsafah Gusjigang, jejaring korban konflik di Poso, jejaring kelembagaan di Majalengka hingga revitalisasi masyarakat di Makassar maupun pemberdayaan masyarakat di Manado.

Selain isu-isu tradisi, lingkungan, pendidikan dan modal sosial, kompleksitas buku ini juga hadir lewat kajian tentang politik citra dalam perspektif kekuasaan, seksualitas masyarakat berisiko, transformasi disiplin klinis, konstruksi sosial tubuh, konflik anak-anak muda penggemar bola hingga kultur resiko nan traumatis. Paradoks modernitas yang hadir juga menuntut penjelasan yang lebih memadai, oleh karenanya bagian akhir buku ini hadir kajian tentang restrukturisasi pendidikan Sosiologi, Neuro-Sosiologi, maupun Sosiologi di era pasca ruang. Semua kajian tersebut hadir untuk menjadi bagian dari upaya menjelaskan perubahan yang terjadi, sekaligus membangun keterlibatan lebih dalam dari bentuk-bentuk pengetahuan yang ada.

Terakhir, publikasi ini memungkinkan hadir karena komitmen dalam rangkaian kegiatan di Universitas Sebelas Maret lewat fasilitasi Ravik Karsidi, Drajat Tri Kartono, dan Yulius Slamet sehingga rangkaian kegiatan Ikatan Sosiologi Indonesia dapat terselenggara. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada Akhmad Ramdhon, Argyo Demartoto, dan Siti Zunariyah

Yulius Slamet yang telah menyiapkan semua materi menjadi bahan yang siap dipublikasikan. Terima kasih juga, teruntuk Buku Litera yang telah memfasilitasi dan memungkinkan semua materi menjadi bahan bacaan yang bisa diakses lebih luas, sekalipun dengan waktu yang teramat pendek. Tentu masih ada banyak kekurangan namun kemauan untuk mengawali publikasi menjadi motivasi yang utama, untuk itu masukan dan saran menjadi penting bagi kita semua.

Surakarta, Oktober 2013
Ikatan Sosiologi Indonesia &
Lab-Sosio Sosiologi FISIP UNS

Daftar Isi

Pengantar	v
Daftar Isi	ix

Bagian Satu

Tradisi dan Perubahan Sosial

Ahmad Zuber

Konflik Agraria Di Masyarakat Pedesaan: Kasus Di Desa Sanggang	3
---	---

Akhmad Ramdhon

Para <i>Penghulu</i> Kauman: Transformasi Dan Formalisasi Tradisi Kampung Kauman Surakarta	15
---	----

Andi Burhanudin, Rasyidah Zainuddin

Institusionalisasi Modal Sosial Di Era Modern Mempertimbangkan Eksistensi Komunitas Khusus	36
---	----

Djaja Hendra

"Jebakan" Keistimewaan DIY: Perspektif Sosiologi Agraria	47
--	----

Eymal B. Demmallino, M. Saleh S. Ali,

Abd. Qadir Gassing & Munsil Lampe

Kapitalisme dan Perilaku Ekonomi Masyarakat Maritim: Studi Kasus pada Komunitas Pasompe' Di Negeri Bugis Makassar Sulawesi Selatan	66
--	----

Ikma Citra Ranteallo, Nazrina Zuryani & Dinny Jusuf

Tenun Toraja: Karya Tangan Berbasis Tradisi Menuju Pasar Global	87
--	----

M. Nurun Najib	
Konstruksi Identitas Keagamaan: Studi Tentang Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki Dengan Masyarakat Lokal	102
Muhammad Masdar	
Urgensi "Trust" Dalam Masyarakat Multietnik: Studi Interaksi Antar Etnik di Wonomulyo Kabupaten Polman Sulawesi Selatan	132
Sigit Pranawa	
Rasionalitas Perajin Untuk Mempertahankan Kelangsungan Usaha: Studi Di Sentra Kerajinan Perak Kotagede	151
Trisni Utami	
Peningkatan Daya Saing Pasar Tradisional Melalui Revitalisasi Kelembagaan	169

Bagian Dua Lingkungan dan Pemberdayaan

Andi Tenri	
Ramai-Ramai Melawan Negara: Dramaturgi Sehari-hari Dibalik Interaksi Pengelolaan Hutan	187
Ary Wahyono	
Community Based Co-Management: Perspektif Sebagai Solusi Alternatif Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	205
Edi Susilo	
Adaptor Sosial: Dari Konsep Ke Beberapa Pengalaman Aplikasi	218
Jefta Leibo, Sri Yuliani & Rahesli Humsona	
Gender Dalam Mitigasi Bencana: Studi Di Kabupaten Karanganyar	234
Nana Haryanti	
Reformasi Sektor Kehutanan: Tantangan Pada Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	254

Rachmad K Dwi Susilo

Pengembangan Model Co-Mamangement Berbasis
Pembelajaran Sosial Untuk Pencegahan Konflik Pengelolaan
Sumber Daya Air Minum Bagi Masyarakat Sekitar
Sumber Air Di Kota Batu 271

Siti Zunariyah

Partisipasi Masyarakat Dalam Program Perhutanan Sosial
Di Yogyakarta 300

Sulistyaningsih

Dinamika Sosial Politik Sertifikasi Hutan Rakyat
Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta 321

Bagian Tiga

Perempuan, Anak dan Perlindungan

Ambar Sari Dewi

Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi
Oleh Perempuan Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah
di Jawa Tengah dan Yogyakarta 341

Aniek Rahmaniah

Perempuan Dan Politik Pada Era Otonomi Daerah 361

Dadang Hikmah Purnama

Kekerasan Terhadap Anak Perempuan Di Palembang 381

Diana T Cahyaningsih, Eva Agustinawati & Sumardiyono

Strategi Perlindungan Bagi Pekerja Terburuk Anak
Menuju Kota Layak Anak Di Surakarta 398

Keppi Sukesu, Yeni Puspita Sari

Migrasi Internasional Dan Pengaruhnya Terhadap
Kebahagiaan Perempuan Buruh Migran
dan Rumah Tangganya 412

Kustini

Perkawinan Dibawah Umur: Pupusnya Masa Depan
Perempuan Di Cianjur 419

Nazrina Zuryani, Ni Luh Nyoman Kebayantini
Caleg, Tim-Sel KPU dan Wareg: Renungan Keterwakilan
Perempuan di Bali 444

Rahesli Humsona

Mengembangkan Relasi Seksual Yang Sehat Melalui
Pemberdayaan Anak Yang Dilacurkan (Ayla)
Di Kota Surakarta 460

Sitti Bulkis, Nursini, A. Nixia Tenriawaru & Rahmadanih

Model Pemberdayaan Kepala Rumah Tangga Miskin
Berspektif Gender Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan
di Kabupaten Soppeng dan Bone 479

Vinita Susanti

Kajian Sosiologis Terhadap Perempuan Pembunuh 493

Widjajanti M Santoso

Revitalisasi PKK: Memikirkan Kontribusi Sosiologis
Dalam Konteks Ketahanan Keluarga 518

Bagian Empat

Pendidikan dan Karakter Moral

Atik Catur Budiati, Siany Indria Liestyasari

Reproduksi Kekerasan di Kalangan Siswa SD
dan Implikasinya Bagi Pendidikan Berkarakter
Di Kota Surakarta 543

Bagus Haryono, Edy Tri Sulistyono & Ahmad Zuber

Pengembangan Model Pendidikan Empat Pilar Bangsa
Pada Masyarakat Akar Rumput Menuju Terwujudnya
Integrasi Nasional di Kota Surakarta 562

Bastiana

Interaksi Sosial Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah
Inklusi 586

Hartati Sulistyono Rini

Implementasi Pendidikan Multikultural
Sebagai Modal Sosial Dalam Kehidupan Berbangsa 602

**Sri Hilmi Pujihartati, Bambang Wiratsasongko
& Argyo Demartoto**

Standar Pendidik Sebagai Salah Satu Syarat Keberhasilan
Pelaksanaan Program PAUD Dalam Membentuk
Karakter Anak 620

**Bagian Lima
Modal Sosial**

Arianti Ina Restiani Hunga

Modal Sosial Dalam Industri Berbasis "Putting-Out"
SystemStudi Kasus Cluster Batik di Sragen & Surakarta..... 639

**Arie Wahyu Prananta, Sabarudin Ahmad, Mualim
& Zainal Abidin**

Industrial Impact Analysis In The Industry Gresik, East
Kalimantan and Bali, Using Structural Equation Modeling,
Social And Mapping "Post Industrial Society To Economy
Consumptive" 679

Erik Aditia Ismaya

Falsafah Gusjigang Sebagai Modal Sosial
Membangun Masyarakat Kudus yang Sejahtera 704

Ferdinand Kerebungu

Pemberdayaan Masyarakat Di Obyek Wisata
Pantai Malalayang Dua Manado 720

Indah Meitasari

Dukungan Modal Sosial Dalam Implementasi Program
Jaminan Persalinan Di Kabupaten Majalengka,
Jawa Barat 739

Rosmawaty

Jaringan Sosial Sebagai Strategi Adaptasi Pada Janda
Korban Konflik Di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 762

Syamsu A. Kamaruddin

Revitalisasi Modal Sosial Pada Masyarakat Transisi 772

Bagian Enam

Teori dan Kompleksitas Modernitas

T. R. Andi Lolo, Bastiana

Restrukturisasi Dan Reorientasi Pendidikan Sosiologi

Di Indonesia 785

Argyo Demartoto, Endang Gerilyawati IES

& D Priyo Sudibyo

Seksualitas Masyarakat Berisiko: Studi Kasus

Pada Laki-Laki Yang Berhubungan Seks Dengan Laki-Laki

Di Surakarta 802

Bambang K. Prihandono

Neuro-Sosiologi: Memahami Nalar Modal Sosial

Dan Inovasi Penjelajahan Awal Tentang Konsep

Neuro-Sosiologi Dan Relevansinya Dengan Pembangunan

Modal Sosial di Indonesia 822

Craig Cook

The Social Construction Of Bodies Through Basketball

During The American Occupation Of The Philippines

1906-1922 838

Fajar Junaedi, Akhmad Ramdhon

Fanatisme Berujung Konflik: Potret Identitas Anak Muda

Urban Penggemar Bola 865

Hamzah Fansuri

Kontribusi Keilmuan Sosiologi di Era Pasca-Ruang 883

Siti Amanah, Dien Vidia Rosa & Hery Prasetyo

Pasca Bencana Dan Ketakterhentiannya: Studi Tentang

Kultur Resiko Dalam Keseharian Yang Traumatis 899

M. Ridhah Taqwa

Politik Citra Dan Implikasinya Pada Pemilihan Umum Era Reformasi: Perspektif Sosiologi Kekuasaan 919

Sri Murlianti

Tranformasi Kultural Elemen-Elemen Budaya Disiplin Klinis Ke Dalam Praktik Jasa Perawatan Kecantikan 932

Bagian Satu
Tradisi
dan Perubahan Sosial

Politik Citra Dan Implikasinya Pada Pemilihan Umum Era Reformasi: Perspektif Sosiologi Kekuasaan

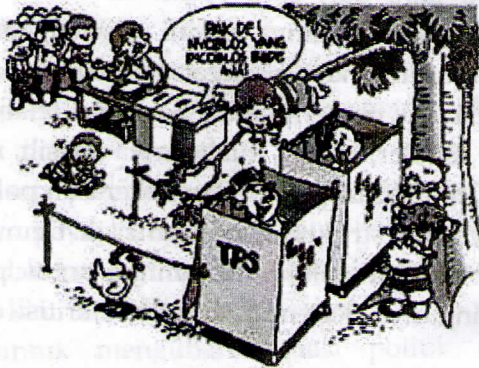
M. Ridhah Taqwa

ridhotaqwa@gmail.com
Universitas Sriwijaya



Pendahuluan

Keseluruhan sejarah yang ditulis selalu tentang ruang-ruang yang dalam waktu yang bersamaan adalah sejarah tentang kekuasaan-kekuasaan (plural)-mulai dari strategi-strategi besar geopolitik sampai taktik-taktik habitat, arsitektur institusional, mulai dari ruang kelas sampai rumah sakit, terus melintasi instalasi-instalasi ekonomi dan politik. (Gaffar, affan, 1999)



Gambar 1. Sketsa pesta demokrasi

Pemilihan umum sebagai praktik demokrasi menjadi sangat penting dipahami karena ia merupakan indikator kualitas demokrasi, bahkan dapat menjadi cermin peradaban suatu bangsa. Jika kualitas pemilunya baik maka baik pula kualitas demokrasi bangsa tersebut. Karena itu menjadi sangat penting untuk memahami praktik demokrasi melalui pemilu di tanah air yang

0	8	0	2	0	9	0	1	1	3	0	2	0	2	7	5
Kode Fakultas	Kode PS/Bagian	Kode Publikasi	Kode Penulis	Tahun Publikasi	Kode Sumber Tulisan	Nomor urut Publikasi dan Fakultas									

telah merdeka kurang dari 7 dasawarsa dengan tiga pase rejim kekuasaan, yaitu era Orde Lama, Orde Baru dan Era Reformasi. Pada Era Orde Lama kita hanya 1 kali menyelenggarakan pemilihan yang dinilai sangat demokratis, sedangkan selama kekuasaan orde baru 6 kali menyelenggarakan pemilihan umum, namun ada banyak peristiwa yang menodai pemilu orde baru tersebut.¹ dan pada era reformasi kita sedang menyongsong penyelenggaraan pemilihan umum yang ke-4 kali, pemilihan umum tahun depan, 2014. Dengan menginjak pemilu ke-11 selama kita merdeka, maka seharusnya kualitas penyelenggaraan pesta demokrasi sudah meningkat secara signifikan dari pemilu sebelumnya. Praktik demokrasi telah menjadi kata kunci dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan Budayawan Emha Ainun Najib berani menyatakan bahwa Demokrasi La Raiba Fih (tidak ada keraguan di dalamnya) (Nadjib, 2009).

Praktik demokrasi melalui pemilihan umum ini penting artinya, karena dapat menjadi instrumen pengukuran apakah ada peningkatan kualitas demokrasi, dari satu era kepemimpinan nasional ke era lain, dari satu rezim ke rezim lainnya. Pada pemerintahan Soekarno hanya sekali diselenggarakan pemilu, tetapi peristiwa itu dipandang sangat demokratis dan berkualitas. Sebaliknya pada era pemerintahan Soeharto telah dilaksanakan pemilu secara reguler, tetapi kualitasnya masih rendah karena banyak praktik mobilisasi politik dan kekerasan politik pada awal Orde Baru, baik secara struktural maupun fisik. Demikian pula pada pemilu era reformasi memiliki arti penting untuk pengembangan demokrasi selanjutnya, karena itu perlu dikritisi dan dievaluasi secara cermat.

Sejak pemilu pertama era reformasi (1999) sampai menjelang pemilu keempat, tahun 2014, wajah politik kita semakin mengarah pada apa yang disebut era transpolitika. Menurut Piliang (2005) dalam dunia transpolitika tidak ada dunia, tidak ada sebuah entitas pun -sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, seksualitas, media, media seni spritualitas- yang dapat bertahan dalam

¹ Lihat misalnya Kritiadi (1997), Taqwa (2007) dan Gaffar (2004).

kondisi kemurniannya (*purity*) tanpa tercemar dari elemen-elemen lain diluarnya. Pencemaran itu tidak hanya merusak ekologi alam, tetapi juga merusak ekologi sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan. Pencemaran ekologi itu telah merusak sosio-politiko-sistem dengan segala habitus yang ada didalamnya. Habitus yang dimaksud berupa praktik pemilihan umum untuk merekrut elit politik nasional dan regional (lokal).

Sejak era reformasi sampai detik ini ekologi politik telah dipenuhi oleh sampah informasi, kotoran citra dan limbah tontonan yang sesungguhnya tidak diperlukan. Sampah kotoran dan limbah itu telah memenuhi ruang-ruang politik politik yang kemudian menghadirkan bentuk kotoran, pembusukan dan eksek-eksek politik. Selanjutnya menurut Piliang (2004), ketika politik telah dicemari oleh sampah-sampah citra maka terciptalah pembusukan politik dalam pengertian bahwa realitas politik telah dimangsa oleh citra-citra palsu politik yang mengaburkan atau menguburkan kebenaran politik. Proses seperti inilah yang kemudian dikonsepsikan sebagai politik citra yang kemudian telah berimplikasi luas pada sendi-sendi kehidupan politik, berbangsa dan bernegara.

Materi tulisan ini tentu tidak bermaksud hanya merayakan berlangsung pembusukan politik, pencemaran ekonologi politik atau praktik demokrasi melalui pemilu yang disesaki dengan tindak kekerasan, penipuan, pemalsuan, pemutarbalikan realitas, tetapi juga berupaya memasuki ranah pembersihan diri (*political purifikasi*) dari pencemaran tersebut. Sebuah usaha mencerahkan politik yang kini berada dalam situasi kegelapan. Pencerahan diperlukan untuk mengubah situasi politik dari kegelapan menuju cahaya, *minal dzulumati ilannur, from darkness to light*. Politik pencitraan tidak dapat dibiarkan menjadi warga dalam praktik demokrasi, karena akan menimbulkan implikasi yang meminimalkan esensi demokrasi.



Gambar 2. Ilustrasi politik citra

Kalau kita posisikan politik citra sebagai bentuk kegelapan politik dan ingin kita ubah menjadi cahaya politik, maka kita harus mengenal apa yang kita maksud dengan politik citra. Adalah sangat penting untuk mengenal politik citra agar kita bisa menghadirkan segala macam pikiran, ucapan, tindakan yang merepresentasi kegelapan politik itu. Menurut Piliang (2005) ada fatamorgana politik yang menunjukkan pada metafora untuk menjelaskan beroperasinya berbagai citra yang bersifat halusinatifdi dalam wacana komunikasi politik. Hal inilah yang perlu dikenali agar tidak menjebak kita pada minimalisme politik.

Politik citra sesungguhnya adalah politik kepura-puraan dan politik seolah-olah. Didalamnya ada unsur kemunafikan atau manipulasi dalam proses komunikasi elit politik dengan massa. Massa memandang ada sebuah proses demokrasi yang sudah sesuai dengan prinsip demokrasi pada aras permukaan, padahal dalam esensinya belum banyak menyentuh prinsip demokrasi yang sesungguhnya. Dalam politik citra berlaku pula prinsip manipulasi untuk mengelabui massa politik. Prinsip manipulasi ini berlangsung melalui arus wacana di media tentang tema kesuksesan ekonomi, kepedulian, jiwa nasionalisme dan kesuksesan politik. Arus wacana melalui media terutama yang muncul dalam bentuk iklan politik yang cenderung berlebihan. Iklan yang berlebihan menurut Piliang (2005) baik melalui ucapan maupun tulisan dan visual bisa berujung pada bentuk kekerasan semiotik yakni kekerasan pada

tingkat tanda dalam pengertian penggunaan bentuk-bentuk tanda yang mengandung di dalamnya sifat dan konotasi kekerasan.

Tujuan utama pencitraan politik adalah bagaimana seseorang aktor atau partai politik meraih kekuasaan. Kekuasaan yang biasa disimbolkan dengan kursi merupakan sasaran akhir. Padahal berkuasa seharusnya hanya sebagai media antara untuk menciptakan tatanan masyarakat ideal sesuai nilai yang dianut oleh partai (Firmansyah, 2012). Dengan menjadikan kekuasaan sebagai tujuan utama, maka segala carapun ditempuh oleh aparatur aktor politik untuk meraih kekuasaan, baik dengan pengerahan massa, penggelontaran dana politik yang banyak maupun praktik kekerasan politik, baik simbolik, struktural dan fisik.

Latar Belakang Politik Citra

Secara geopolitik Indonesia memiliki wilayah sangat luas, tersebar di pulau-pulau yang besar dan kecil sehingga tidak mudah dijangkau oleh aktor politik. Selain itu jumlah penduduk yang telah mencapai 230 juta jiwa, namun belum masih sebagian besar melek politik. Mereka memahami politik terbatas pada permukaan atau ritualnya saja, sementara esensi atau spritnya masih sangat terbatas. Akibatnya mereka mudah dipengaruhi oleh iklan politik, oleh foto atau gambar yang bertebaran di jalan, di pohon, tiang listrik dan telepon, di spanduk atau baliho yang dipasang di depan gedung dan pertokoan.

Kondisi geopolitik dan demografi tersebut di atas semakin bersentuhan dengan budaya politik mental menerabas atau prinsip pragmatisme yang menjangkiti masyarakat. Gaya hidup populis lebih menokohkan orang yang sering tampil di media. Rating menjadi ukuran kemajuan atau kesuksesan bagi setiap orang. Dengan intensitas tampil diberbagai media termasuk di ruang publik, maka seseorang menjadi terkenal. Menjadi orang yang dikenal secara individual inilah yang kemudian menjadi ruang bagi aktor untuk masuk arena politik praktis, baik di eksekutif maupun legislatif. Dalam proses ini berlaku prinsip pragmatisme untuk mencapai tujuan. Karena itu dana yang digunakan untuk mengembangkan pencitraan politik pun menjadi keniscayaan.

Dalam konteks ini yang kemudian menjadikan arena politik seolah sebagai arena penjudian. Peluangnya sedikit sementara biaya dikeluarkan sangat banyak. Investasi politik lebih seringkali hilang tanpa bekas dan seringkali pula menjadikan aktornya mengalami sakit kejiwaan.

Selain faktor budaya politik dan jiwa pragmatis warga negara, partai yang menjadi agen utama dunia politik, seringkali memiliki ideologi kepartaian yang dalam tesaknya cukup kuat, tetapi dalam praktik sangat lemah. Partai lemah jika berhadapan godaan kekuasaan. Dengan pragmatisme politik ini, tampaknya masih sulit mengharapkan partai akan menjadi agen perubahan ekonomi politik bangsa. Karena itu, aktor politik justru lebih cenderung larut dalam mekanisme politik citra yang banyak diperankan oleh media massa.

Media dan Mekanisme Politik Citra

Mekanisme politik citra tidak hadir dengan sendirinya, tetapi melalui proses sosial, politik ekonomi dan budaya. Politisi (balon legislatif) dan calon pemimpin nasional (R1-R2) membutuhkan ruang publik untuk menampilkan dirinya agar dikenal dan disenangi oleh rakyat. Sementara ruang publik untuk berkomunikasi politik secara langsung dengan warga yang tersebar di berbagai tempat agak terbatas. Mereka memerlukan waktu, tenaga dan dana yang besar untuk bisa tatap muka dengan warga. Pada saat yang bersamaan, tersedia media cetak dan elektronik yang bisa mempercepat mereka untuk dikenal oleh warga pemilih. Disinilah terbuka ruang bagi media untuk mengenalkan sosok para calon kepada publik. Para kandidat pun menjadikan media sebagai ruang untuk bersolisasi atau kampanye.

Karena jumlah kandidat dalam pemilu mencapai ribuan, maka persaingan cukup ketat.² Karena itu pula banyak yang mengambil jalan pintas dengan memunculkan dirinya melalui media cetak dengan mencitrakan sebagai orang baik, baik, jujur, rela berkorban, sebagai manusia pejuang, menghormati orang tua, pendidik yang

² Calon anggota legislatif Pemilu 2014 yang telah diumumkan oleh KPU Pusat sebanyak 6.608 yang akan memperebutkan 560 kursi DPR pusat.

baik, orang yang bijak karena menyiapkan pendidikan dan masa depan anak dan cucunya. Ada beberapa media yang juga dimiliki atau dapat 'dibeli' oleh para politisi agar ditayangkan melalui media cetak dan elektronik. Ada banyak media publik, termasuk media sosial yang muncul dan terorganisir setiap menjelang pesta demokrasi. Jadi ada hubungan antara momen politik dengan maraknya penerbitan media cetak dan tayangan di media elektronik. Media tersebut dijual sangat murah dan bahkan beberapa diantaranya dibagikan secara gratis.

Kita sebaiknya menghidupkan sejumlah narasi kecil untuk melawan narasi besar yang telah menyatukan kapitalisme dan demokrasi, kapitalisme dan konsumerisme. Keduanya kini mejadi kiblat, menjadi narasi besar yang mematikan narasi kecil. Kapitalisme dan konsumerisme telah memelihara politik citra bahkan menjadikan sebagai anak kandungnya sampai sekarang ini.

Media bekerja sedemikian rupa lewat berbagai narasi terbentuknya citra politik seseorang. Dalam konteks ini bahasa dan kekuasaan menjadi satu kesatuan. Selain media cetak dan TV media sosial pun (internet) semakin menunjukkan eksistensi berlangsungnya mekanisme citra politik. Media dapat mengurangi hambatan geopolitik dan termasuk kronopolitik. Dengan media jarak wialay atau keluasan wilayah dapat diselesaikan dengan media teknologi. Kronopolitik pun dapat diatasi oleh media karena meid TV mampu mengisi tayangan 24 jam dalam sehari.

Bahasa politik Yang berkembang melalui mediapun semakin memberi ruang pada aktifis pollitik. Jumlah media penyiaran TV, Koran dan berita melalui jejaring sosial terus bertambah mengiri pergeseran waktu. Bahkan ada kecenderungan baru dimana peran geopolitik telah diambil alih oleh kronopolitik. Dalam duani yang sedang berlari, waktu dan kecepatan menjadi energi untuk menggerakkan mesin kemajuan, termasuk dalam meraih kesempatan politik kekuasaan. Sebaliknya siapapun yang tidak mampu mengendalikan waktu dan mengembangkan politik perubahan akan menjadi korban dari dunia tersebut (Piliang, 2005: 166-167).

Politik Citra Pemilu 2014

Era reformasi memang berbeda dengan era orde baru, dimana ada satu kontestan pemilu yang mendominasi simbol-simbol dan ruang-ruang atau wacana kekuasaan. Kini di era reformasi kekuasaan bersifat menyebar dan mewujud dalam beragam tanda atau simbol, tidak hanya melekat pada seorang aktor, tetapi bisa pada beberapa aktor atau komunitas. Subyek tidak hanya orang tetapi juga pada benda atau simbol. Pada era ini pengaruh media sebagai ruang beroperasinya berbagai simbol kekuasaan dalam masyarakat semakin menguat.

Berdasarkan pengalaman sejarah selama 3 kali pemilu terakhir, ada kenderungan kuat bahwa politik citra masih akan mewarnai pemilu berikutnya tahun 2014, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden. Bahkan ada peluang praktik politik citra semakin menguat seiring dengan makin dekatnya hari H pemilu. Para kandidat akan belajar banyak dengan pengalaman SBY memenangkan pilpres tahun 2004 dan 2009 yang terutama karena kemampuan timnya membangun politik pencitraan. Selain faktor kesuksesannya bidang ekonomi dan politik pada periode sebelumnya, faktor politik citra terhadap figur SBY pada pemilu 2009, merupakan modal politik yang besar sehingga tidak mudah dikalahkan oleh 2 rivalnya, yaitu mantan atasannya (Megawati) dalam kabinet Gotong Royong dan mantan wakilnya (Yusuf Kalla) pada periode 2004-2009.

Politik pencitraan akan mengalami perluasan, seiring dengan makin berkembangnya media cetak dan elektronik. Media tersebut masih dipandang lebih efisien karena karakternya yang lebih mudah menjangkau dan dijangkau oleh massa politik. Media TV yang memiliki karakter mendekatakan realitas pada publik akan sangat sibuk melayani iklan politik pada akhir tahun sampai pertengahan tahun depan. Tahun 2014 merupakan tahun politik Indonesia, dan kita akan banyak ditawarkan iklan politik sehingga perlu kecerdasan tersendiri untuk meresponnya.

Implikasi Politik Citra

Ada sejumlahh implikasi berlangsungnya politik citra dalam pentas demokrasi kita seperti demoralisasi politik, minimalisme demokrasi, nomadisme politik, politik paranoid dan politik horor (ketakutan). Dalam praktik politik yang mengindikasikan demoralisasi, aspek moral dan etika tidak lagi mendi referensi atau tidak menjadi acuan bagi aktor politik. Yang dipentingkan oleh mereka adalah tercapainya tujuan politik yaitu ketika kekuasaan berada dalam gengamannya. Dengan demikian pada saat yang bersamaan nilai-nilai politik pun menjadi minimal. Massa terperangkap pada ritual pemilihan umum, sementara esensi dari demokrasi menjadi terabaikan. Karena itu, tidak mengherankan jika para politisi berusaha menghalalkan segala cara, termasuk dengan memperkarakan hasil pemilu melalui institusi hukum untuk meraih kemenangan. Rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Daerah seringkali diintervensi, bahkan di-MK-kan demi membuka peluang kemenangan. Tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi, Kamis 3 Oktober 2013 dalam percobaan penyuaipan perkara pemilukada di Kabupaten Lebak dan Gunung Mas bisa menjadi bukti, hukum bisa dipertainkan oleh para politisi.

Gejala nomadisme politik juga mewabah di kalangan politisi. Mereka cenderung mudah berpindah dari satu partai ke partai lain. Dari posisi pro pemerintah atau menjadi oposisi. Karena kepentingan sesaat yang menjadi pilihan, maka tidak mengherankan jika dalam dalam satu periode pemilu, politisi berpindah dari dari satu partai, dan pada pemilu berikutnya menjadi caleg di partai yang berbeda. Selain itu juga muncul gejala politik paranoid, khususnya dalam bentuk horor politik. Penciptaan ketakutan kepada lawan politik menjadi strategi untuk mendapatkan dukungan maksimal dari pemilih. Bentuk horor tersebut tidak hanya berwujud secara fisik tetapi juga non fisik atau metafisik. Persaingan ketat elit politik untuk memperoleh kursi, baik di lembaga legislatif maupun kursi eksekutif seperti bupati atau walikota menjadi ruang terbuka politik horor. Tidak jarang calon atau pejabat yang sedang menjabat meninggal dunia atau sakit secara permanen tapi bisa dideteksi penyebab kematian atau penyakitnya. Selain itu, ada banyak

kasus asusila atau perselingkuhan yang muncul di media sebelum pencoblosan Pemilu Kada, dan setelah usai pesta demokrasi sirna pula isu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa wacana tersebut lebih merupakan politik horor dan sekaligus untuk menunjukkan citra buruk lawan politik.

Pada gambar 3 dan 4 merupakan contoh media kampanye yang dapat dikategorikan sebagai usaha pencitraan politik.



Gambar 3. EO seorang artis yang sebelumnya lebih sering tampil seksi, karena dicalonkan dari partai Islam, maka dia memakai busana muslim.



Gambar 4. Sang Caleg menumpang popularitas pada anak gadisnya, karena dia telah lebih dulu populer di daerah pemilihan sang bapak.

Politik pencitraan juga berimplikasi pada biaya politik yang tinggi dan bahkan nyaris tak terbatas. Politik biaya tinggi tidak hanya karena meluasnya arena politik melalui pemilihan langsung oleh rakyat, tetapi juga karena biaya pencitraan politik, misalnya melalui polling dan iklan media massa, khususnya elektronik (TV) memang sangat mahal. Karena itu, para kandidat yang telah terpilih kemudian ada kecenderungan hanya beberapa tahun dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, karena harus memperhitungkan pengembalian biaya kampanye politik. Setelah masa suka cita telah lewat sekitar setahun, maka pada tahun kedua dan ketiga mereka dapat melaksanakan tugasnya, tetapi pada tahun keempat dan kelima pada umumnya waktunya terkuras untuk memastikan keuntungan ekonomi-politik, sambil mencari peluang untuk terpilih kembali pada periode berikutnya. Selain itu, mereka juga dikejar waktu untuk meningkatkan pencitraan politik agar tetap dapat dipercaya untuk menduduki jabatan berikutnya. Walhasil, sebagai besar dana yang telah diperoleh akhirnya lebih banyak dipakai untuk mencitrakan diri sendiri. Pencitraan diri sebagai pemimpin atau politisi yang amanah, berwibawa dan pemurah tidak hanya ditunjukkan melalui media iklan. Ada juga politisi yang rajin memberikan sumbangan, sedekah dan mengunjungi pelosok desa asal diliput secara luas oleh media elektronik. Ini juga merupakan media pencitraan secara langsung.

Implikasi yang lebih jauh dari politik pencitraan, pemilih akan kesulitan mendapatkan pilihan yang tepat. Jika politik citra yang menggeliat, yang menjadi warna dari demokrasi, atau bahkan justru menjadi simbol demokrasi. Pemilih tidak mudah memilih dan memilih mana calon yang mengedepankan politik citra dan mana politisi sejati, mana demokrasi deliberatif dan mana ritual demokrasi. Dengan demikian pemimpin yang terpilih adalah seolah-olah pemimpin, sekonyong-konyong penguasa yang baik hati. Karena itu, untuk sampai ke arah sana seharusnya bersifat timbal balik. Disatu sisi media mampu menampilkan karakter pemimpin yang visioner, ideal, amanah dan jujur. Sedangkan disisi lain pemilih juga memiliki kecerdasan politik, memiliki spritualitas fenomena kekuasaan, memiliki kepekaan simbol-

simbol kekuasaan, kemampuan deteksi dini radar kerakusan dan ketamakan kekuasaan dan ekonomi politisi. Jika tidak maka kita semua akan terjebak dengan ritual politik yang tidak memiliki basis spirit politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan peradaban.

Kepekaan politik kita juga akan mengalami persoalan jika politik citra yang berkembang. Piliang menilai bahwa dalam politik citra kita lebih banyak melihat ketimbang berpikir. Aktifitas melihat dominasi kehidupan politik, ketimbang memikirkan. Dunia kesadaran politik durasinya didominasi oleh kesadaran melihat citra, gambar, tayangan, info politik; ketimbang durasi berpikir, merenung, refleksi makna politik (Piliang, 2005).

Penutup

Pertanyaan penting dijawab adalah bagaimana mengenali dan sekaligus mengatasi praktik politik citra, politik seolah-olah atau politik pura-pura. Untuk menjawab pertanyaan ini tentu tidak mudah, sama tidak mudanya mengenal politik citra. Kini media semakin canggih dalam menampilkan fenomena politik yang cenderung menganut ideologi pencitraan. Media juga memainkan peran dan mendapatkan keuntungan dari pemberitaan seputar politik pencitraan. Karena itu diperlukan pendewasaan politik baik bagi pemilih maupun para politisi. Pendidikan politik, terutama bagi pemilih pemula merupakan keniscayaan karena mereka belum banyak mengenal politisi dan juga belum memiliki kemampuan untuk mendeteksi citra-citra politik.

Sementara itu, etika politik para politisi juga perlu diinternalisasikan agar mereka memiliki tanggungjawab, amanah dan jujur dalam berdemokrasi. Jika hal kedua hal ini diabaikan, maka kita akan mengalami kegagalan dalam membangun kehidupan politik dan ekonomi (kesejahteraan rakyat), sekaligus kita akan mengalami kegagalan dalam membangun peradaban bangsa. Partisipasi dari kalangan insan kampus juga sangat diperlukan untuk mengembangkan pemilih yang cerdas, sekaligus politisi yang bermartabat.

Daftar Pustaka

- Firmansyah. 2011. Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokratisasi. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Foucault, Michael. 2001. Pengetahuan kekuasaan. Mizan, Bandung.
- Gaffar, Afan. 1999. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harker, Richard dkk. 2005. Habitus x Modal + Ranah = Praktik: Pengantar Pada Pemikiran Pierre Bourdieu, Jelasutra. Bandung.
- Khalidun, Ibnu. 2009. Muqaddimah, Pustaka Firdaus. Jakarta.
- Kristiadi, J. 1997. Perilaku Pemilih Pada Pemilu Era Orde Baru. Majalah Prisma, No. 3, tahun 1997.
- Latf, Yudi dan Subandi, Idi. 1996. Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru. Mizan. Bandung,
- Muzani, Saiful dkk. 2011. Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih Dalam pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru. Mizan. Bandung.
- Najib, Emha A. 2009. Demokrasi La Roiba Fih. Kompas, Jakarta.
- Piliang, Yasraf A. 2005. Transpolitika: dinamika politik di dalam era virtualitas. Jlasutra, Yogyakarta.
- Suseno, Frans M. 2001. Kuasa dan Moral. Gramedia, Jakarta.
- Taqwa, Ridhah. 1997. Perilaku Politik Ummat Islam. Majalah Prisma, No. 3, tahun 1997.
- Taqwa, Ridhah. 2004. Perilaku Pemilih dan Politik Kepartaian, Jurnal Sosiosains. Program Pascasarjana. UGM.
- Thomson, Denis F. 2000. Etika Politik Pejabat Negara. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.